

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL

Oleh:
Mahmudi dan Dewi Restiningrum^{*)}

ABSTRACT

This research tries to identify the effect of economic growth, local government original revenue, general allocation grant, and remaining balance of local government budget for the year t towards the allocation of capital expenditure budget for the year $t+1$. This research used secondary data drawn from municipal budget realization report for the year 2003-2005 that was published by Central Bureau of Statistic. We used 108 local governments in Java as the sample of research. Based on regression analysis, the research shown the result that all independent variables, i.e. economic growth, local government original revenue, general allocation grant, and remaining balance of local government budget for the year t statistically significant affect the allocation of capital expenditure budget for the year $t+1$. It mean that government officials for some extent consider past year data of economic growth level, local government original revenue, general allocation grant, and the remaining balance of budget to determine the allocation of next year capital expenditure budget.

Keywords: Economic Growth, Local Government Original Revenue, General Allocation Grant, Remaining Balance of Budget, and Capital Expenditure

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia yang dimulai sejak 1 Januari 2001 telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan untuk membiayai keperluan daerah. Dengan diterapkannya otonomi daerah pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk bisa meningkatkan kemandirian daerah termasuk kemandirian dalam hal keuangan.

Selain peningkatan kinerja keuangan, pelaksanaan otonomi daerah juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dengan otonomi daerah menjadikan pemerintah yang lebih dekat dengan rakyatnya

^{*)} Mahmudi adalah Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dan Dewi Restiningrum adalah Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

sehingga diharapkan pemerintah lebih responsif terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Pemerintah daerah ditantang untuk mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal itu maka pemerintah daerah harus memberikan fasilitas pendukung sebagai investasi. Dengan demikian pemerintah hendaklah menambah komposisi alokasi belanja yang lebih tinggi, karena dengan komposisi belanja modal yang tinggi tersebut pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kepercayaan publik.

Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dengan otonomi daerah diharapkan PAD meningkat sehingga menurunkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat. Namun dalam realitasnya baru beberapa daerah saja yang memiliki kemandirian daerah yang memadai, sedangkan sebagian besar masih tergantung pada dana transfer dari pusat. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001). Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah memberikan dana perimbangan dan salah satu komponen dana ini yang memberikan kontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembagunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah yang dalam jangka menengah dan panjang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah.

Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas publik dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi ini. Wong (2004) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini pada akhirnya dapat meningkatkan PAD dan kemandirian daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah juga terkait dengan perubahan struktur APBD yang berorientasi pada anggaran berbasis kinerja. Dalam struktur APBD berbasis kinerja yang baru, dimungkinkan terjadinya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA). Sisa anggaran tahun yang lalu merupakan salah satu sumber penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya. Pada umumnya SiLPA akan menjadi alternatif pertama yang akan digunakan pemerintah daerah apabila terjadi defisit anggaran. SiLPA Bersifat *carry-over fund* yang akan berpengaruh

terhadap neraca yaitu penambahan akun ekuitas dana khususnya ekuitas dana lancar (Mahmudi, 2007). Besar kecilnya SiLPA terkait dengan efisiensi anggaran dan pelampauan target pendapatan yang dilakukan daerah. SiLPA yang dimiliki daerah dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan daerah untuk dialokasikan pada belanja modal, investasi daerah, pembayaran utang, dan pembentukan dana cadangan.

Terkait dengan hal itu, permasalahan penelitian yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah apakah pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun t berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal tahun $t + 1$? Adapun tujuan lebih lanjut penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan anggaran belanja modal menggunakan informasi pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan SiLPA tahun lalu sebagai dasar untuk menentukan besarnya alokasi anggaran belanja modal.

B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita (Boediono, 1981). Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah/PDRB (Saragih, 2003). Pertumbuhan ekonomi dapat berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi merupakan laju tingkat kenaikan PDRB riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. PDRB sendiri dapat dihitung berdasarkan dua pendekatan, yaitu dari sisi sektoral/lapangan usaha dan dari sisi penggunaan. Selanjutnya PDRB juga dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan.

Total PDRB menunjukkan jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator untuk mengevaluasi perkembangan/kemajuan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Angka pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari perubahan nilai PDRB pada harga konstan dari tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Sumber utama pertumbuhan juga berasal dari peningkatan produktivitas seluruh perekonomian. Di tengah kesulitan pemerahan sumber sumber dana investasi maka produktivitas masyarakat dan efisiensi perekonomian harus terus ditingkatkan.

Hasil penelitian yang dilakukan Lin & Liu (2000) menunjukkan desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Oates (1995), Lin dan Liu (2000) membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mendukung sintesa yang menyatakan bahwa pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi. Hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien

berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik (Lin dan Liu, 2000; Mardiasmo, 2002; Wong, 2004).

Pertumbuhan ekonomi selanjutnya berdampak terhadap kebutuhan pemenuhan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi produktif di daerah, seperti sarana transportasi, komunikasi, dan sarana publik lainnya. Sebab apabila daerah tidak menopang perekonomian daerah dengan infrastruktur yang memadai maka kesinambungan pertumbuhan ekonomi akan terancam. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mengalokasikan belanja modal sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal cukup banyak diteliti. Penelitian yang dilakukan Wong (2004) menunjukkan pembangunan sektor industri tertentu (dalam hal ini sektor retail dan jasa) memberikan kontribusi positif terhadap kenaikan pajak. Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Mereka menemukan adanya korelasi yang kuat antara belanja modal (investasi) pada infrastruktur terhadap tingkat desentralisasi. Alokasi anggaran pembangunan ini pada gilirannya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini hendak diuji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian belanja modal. Hipotesis yang dirumuskan dinyatakan sebagai berikut:

H1 : Pertumbuhan Ekonomi tahun t berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal $t+1$.

Pengaruh PAD terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah.

Dengan adanya otonomi daerah maka daerah mempunyai kewenangan sendiri dalam mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dengan kewenangan tersebut maka daerah juga berwenang membuat kebijakan daerah guna menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mencapai hal tersebut maka pendapatan asli daerah juga harus mampu menopang kebutuhan-kebutuhan daerah bahkan diharapkan tiap tahunnya akan selalu meningkat. Tiap daerah diberi keleluasaan dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya sebagai wujud asas desentralisasi.

Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Optimalisasi

penerimaan PAD hendaknya didukung dengan upaya pemda meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi PAD yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro (Mardiasmo, 2002).

Pemerintah daerah yang memiliki PAD yang tinggi mempunyai diskresi yang lebih tinggi untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan aspirasi dan prioritas daerah. Peningkatan PAD diharapkan diikuti dengan peningkatan pelayanan publik. Sementara itu, untuk meningkatkan pelayanan publik pemerintah daerah perlu melakukan berbagai investasi dan perbaikan infrastruktur publik yang pembiayaannya berasal dari alokasi belanja modal. Berdasarkan landasan teoretis dan argumentasi di atas, maka hipotesis kedua dinyatakan sebagai berikut:

H2 : Pendapatan Asli Daerah tahun t berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal tahun $t+1$.

Pengaruh DAU terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah bahwa yang dimaksud dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Dana perimbangan yang diperoleh pemerintah daerah terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil.

Dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Dana alokasi umum ini dimaksudkan untuk menggantikan transfer berupa subsidi daerah otonom dan inpres. Adapun tujuan dari transfer ini adalah untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah dan pusat dan antar daerah. Sehingga dana alokasi umum tiap daerah tidak akan sama besarnya. Daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah rendah akan mendapatkan dana alokasi umum yang tinggi, dan begitu juga sebaliknya daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah tinggi akan mendapatkan dana alokasi umum yang rendah.

Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang lebih penting.

Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin *et. al.* (1994) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga

memungkinkan terjadinya respon yang *non-linier* dan *asymmetric*. Dalam penelitiannya Holtz-Eakin *et. al.* (1994) menyatakan terhadap keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal.

Pada studi yang dilakukan oleh Legrenzi & Milas (2001) menemukan bukti empiris bawasanya dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Prakoso (2004) memperoleh temuan empiris yang sama yang menunjukkan bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. Berdasarkan landasan teoretis dan temuan-temuan empiris di atas maka hipotesis ketiga dinyatakan sebagai berikut:

H3 : Dana Alokasi Umum tahun t berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal tahun $t+1$.

Pengaruh SiLPA terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Struktur APBD baru yang berbasis kinerja memungkinkan terdapat SiLPA pada akhir tahun anggaran, dan dana sisa anggaran tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk sumber pembiayaan penerimaan tahun anggaran berikutnya. SiLPA merepresentasikan sisa kas yang timbul karena realisasi pendapatan daerah yang melebihi realisasi belanja daerah. Ada tidaknya SiLPA dan besar kecilnya sangat tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah. Jika pada tahun anggaran tertentu realisasi belanja daerah lebih rendah dari anggaran atau terjadi efisiensi anggaran, maka dimungkinkan akan diperoleh SiLPA yang lebih tinggi. Tetapi sebaliknya jika belanja daerah tinggi, maka SiLPA yang diperoleh akan semakin kecil, bahkan jika belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah sehingga menyebabkan terjadi defisit fiskal, maka tidak ada SiLPA untuk tahun anggaran bersangkutan tetapi justru dimungkinkan terjadi Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Dengan demikian, keberadaan SiLPA tersebut memberikan sinyal adanya kinerja anggaran yang baik pada tahun anggaran bersangkutan (Mahmudi, 2007).

Sisa perhitungan anggaran pada tahun anggaran yang lalu selanjutnya akan dimasukkan pada APBD tahun anggaran berikutnya sebagai elemen pembiayaan. Sisa ini akan dimasukkan pada bagian pertama di sisi pembiayaan penerimaan berupa bagian Sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu. Dengan adanya penambahan dana dari Sisa perhitungan, maka dana tersebut dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan pada tahun anggaran berikutnya baik untuk membiayai belanja langsung kegiatan yang di dalamnya terdapat belanja modal.

SiLPA merupakan kas bebas (*free cash*) yang belum terikat penggunaannya. Penggunaan SiLPA dilakukan terkait dengan adanya kebijakan anggaran atau karena adanya perubahan anggaran. SiLPA tersebut dapat dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan, investasi daerah, atau pemberian pinjaman (Mahmudi, 2007). Dengan adanya SiLPA maka dimungkinkan untuk digunakan sebagai penambah alokasi belanja modal. Dari uraian di atas maka hipotesis keempat dirumuskan sebagai berikut:

H4 : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun t berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal tahun t+1.

C. METODE PENELITIAN

Sampel dan Data Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota se Jawa dengan periode amatan tahun 2003 – 2005.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari data Dirjen Perimbangan Keuangan RI dan Badan Pusat Statistik. Dari Laporan Realisasi APBD ini diambil data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan data untuk menghitung besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data PDRB ini digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel terikat (*Dependent Variabel*) dalam penelitian ini adalah Belanja Modal dan variabel bebasnya (*Independent Variabel*) adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

1. Pertumbuhan ekonomi diperoleh dari data PDRB konstan tahun t dikurangi PDRB tahun t-1 kemudian dibagi dengan PDRB t-1.

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1})}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

PDRB_t = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t

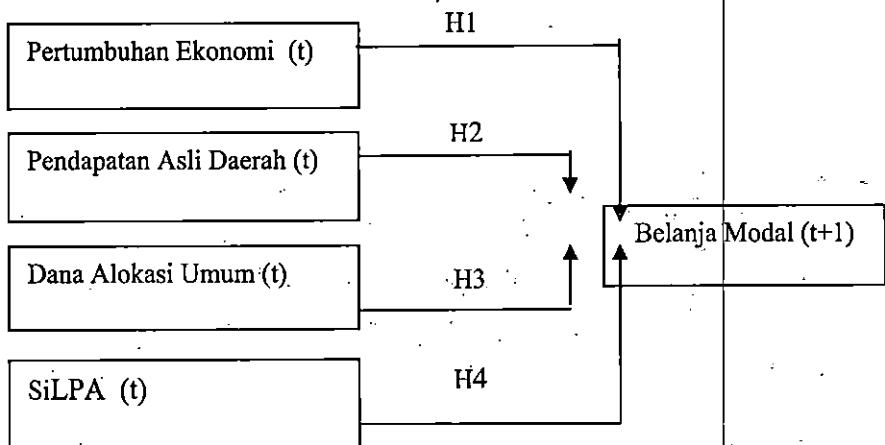
PDRB_{t-1} = Produk Domestik Regional Bruto satu tahun sebelum tahun t

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi, bagian laba perusahaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Data PAD diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana transfer pusat yang diterima daerah sebagai dana perimbangan untuk menutup celah fiskal. Data DAU diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran.
4. SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), merupakan sisa lebih anggaran yang diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{SiLPA} &= \text{Surplus/Defisit} + \text{Pembiayaan Netto} \\
 &= (\text{Realisasi Pendapatan} - \text{Realisasi Belanja}) + (\text{Realisasi} \\
 &\quad \text{Penerimaan Pembiayaan} - \text{Realisasi Pengeluaran Pembiayaan}) \\
 &= (\text{Realisasi Pendapatan} + \text{Realisasi Penerimaan Pembiayaan}) - \\
 &\quad (\text{Realisasi Belanja} + \text{Realisasi Pengeluaran Pembiayaan}) \\
 &= \text{Realisasi Penerimaan Daerah} - \text{Realisasi Pengeluaran Daerah}
 \end{aligned}$$

5. Belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang berdampak pada penambahan aset yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah; jalan dan jembatan; bangunan air atau irigasi; instalasi, bangunan gedung; monumen; alat-alat besar; alat-alat angkutan; alat-alat bengkel; alat-alat pertanian; alat-alat kantor dan rumah tangga; alat-alat studio; alat-alat komunikasi; alat-alat kedokteran; alat-alat laboratorium; buku/perpustakaan; barang bercorak kesenian dan kebudayaan; hewan, ternak serta tanaman; dan belanja modal alat-alat persenjataan/keamanan. Data belanja modal diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran.

Gambar
Kerangka Pikir Penelitian



Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda untuk memprediksi kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 PE + \beta_2 PAD + \beta_3 DAU + \beta_4 SiLPA + e$$

dimana:

Y = Belanja Modal (BM)

α = Konstanta

- β = Slope atau koefisien regresi atau intersep
- PE = Pertumbuhan Ekonomi
- PAD = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- DAU = Dana Alokasi Umum (DAU)
- SILPA = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- e = error

D. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik agar hasil kesimpulan yang diperoleh tidak menimbulkan nilai yang bias. Adapun uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi dan Uji Normalitas. Hasil model analisis data ini telah lolos melewati uji asumsi klasik standar yang sudah umum dilakukan dalam pemodelan ekonomi (Sekaran, 1992).

Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linier antar variabel independen (multikolinieritas). Berdasarkan hasil regresi variabel independen dan variabel dependen menghasilkan nilai Toleransi dan VIF pada keempat variabel bebasnya. Untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran multikolinieritas dapat digunakan Uji VIF yaitu apabila nilai VIF kurang dari 10 atau besarnya toleransi lebih dari 0,1. Tabel 1 menunjukkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas yang terjadi pada variabel Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU dan SiLPA. Dimana nilai *tolerance*-nya diatas 0,1 dan nilai VIF-nya tidak lebih besar dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa antar variabel-variabel tersebut tidak terdapat kolerasi sehingga tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 1
Hasil Pengujian Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	10251.692	9905.982		1.035	.302		
DAU	.054	.027	.119	1.986	.048	.838	1.194
PAD	.440	.055	.477	7.965	.000	.837	1.194
SILPA	.208	.094	.127	2.205	.029	.908	1.102
PE	.3706214	1634.144	.129	2.268	.024	.926	1.080

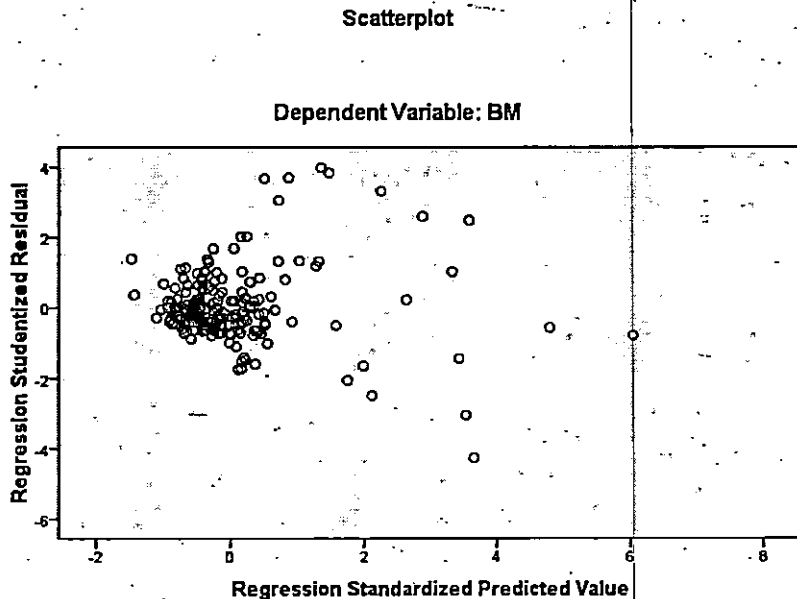
a. Dependent Variable: BM

Sumber : Output SPSS

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan model karena varian gangguan berbeda antara satu observasi ke observasi lain. Pengujian terhadap heteroskedastisitas dilakukan plot residual yaitu dengan melihat sebaran residual untuk setiap pengamatan terhadap nilai prediksi Y. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independent (ZPRED) dengan residualnya (SRESID) Jika ditemukan plot residual membentuk pola tertentu maka terjadi gejala heterosekedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 1 tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heterokedastisitas.

Gambar 1
Pengujian Heteroskedastisitas



Sumber : Output SPSS

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah terjadi hubungan antara data yang bersifat time series. Pengujian ada tidaknya autokorelasi dilakukan dengan menggunakan metode Durbin-Watson (DW). Salah satu cara menentukannya yaitu terjadi autokorelasi positif jika nilai DW < -2, tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW berada pada $-2 \leq DW \leq +2$ dan terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW > +2. Hasil analisis diperoleh nilai *Durbin Watson Test* dapat dilihat pada tabel 2 sebesar 1,999 Hal ini berarti nilai DW berada pada $-2 \leq DW \leq +2$. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 2
Pengujian Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.605 ^a	.365	.353	3.7250359E4	.365	30.382	4	211	.000	1.999

a. Predictors: (Constant), PE, SILPA, DAU, PAD

b. Dependent Variable: BM

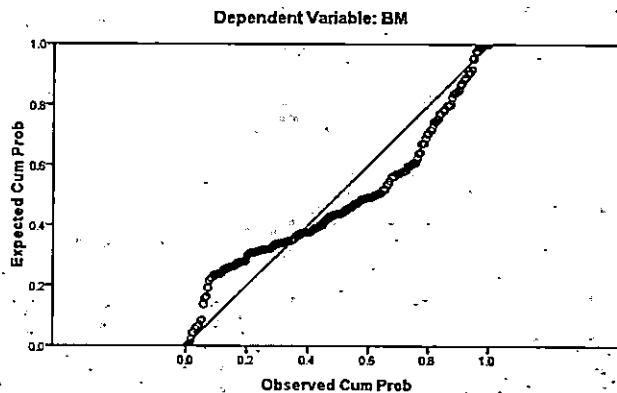
Sumber : Output SPSS

d. Uji Normalitas

Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependent (Y), variabel independent (X) atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Pengujian normalitas data melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik *normal probability plot*. Dari hasil pengolahan data seperti gambar 2 di bawah ini dapat dilihat bahwa data tersebar mendekati garis diagonal. Hal ini berarti bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal

Gambar 2
Pengujian Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Output SPSS

Pengujian secara Simultan (*F-Test*)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model yang digunakan dalam penelitian ini sudah sesuai dan variabel independen yang digunakan apakah dapat menjelaskan variabel dependen sebagaimana dijelaskan pada model penelitian. Pengujian secara simultan ini menggunakan uji F, yaitu dengan membandingkan antara nilai signifikansi F dengan nilai signifikansi yang digunakan yaitu 0,05.

Tabel 3
Pengujian Hipotesis secara Simultan

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1. Regression	1.686E11	4	4.216E10	30.382	.000 ^a
dual	2.928E11	211	1.388E9		
Total	4.614E11	215			

a. Predictors: (Constant), PE, SILPA, DAU, PAD

b. Dependent Variable: BM

Sumber : Output SPSS

Tabel 3 di atas menunjukkan hasil perhitungan statistik uji F dengan hasil nilai signifikansi F sebesar 0,000 di bawah 0,05 yang berarti secara simultan seluruh variabel independen, yaitu Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU dan SILPA berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal. Dengan demikian model yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku belanja modal dalam APBD.

Pengujian Parsial (*t-test*)

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Untuk pengujian secara parsial ini digunakan uji-t dengan derajat signifikansi (α) 5%. Hasil perhitungan statistik pada pengujian parsial ini ditunjukkan pada table.4 berikut:

Tabel 4
Hasil Pengujian Hipotesis Parsial

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	10251.692	9905.982		1.035	.302		
	DAU	.054	.027	.119	1.986	.048	.838	1.194
	PAD	.440	.055	.477	7.965	.000	.837	1.194
	SILPA	.208	.094	.127	2.205	.029	.908	1.102
	PE	3706.214	1634.144	.129	2.268	.024	.926	1.080
Dependent Variable: BM								

Sumber: Output SPSS

Hasil perhitungan statistik tersebut menunjukkan bahwa dari keempat variabel independen yang diuji semua variabel signifikan mempengaruhi belanja modal, yaitu variabel Pertumbuhan Ekonomi (0,024), Pendapatan Asli-Daerah (0,000), Dana Alokasi Umum (0,048) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (0,029). Dari Keempat variabel tersebut menunjukkan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 persen.

Hasil estimasi model dapat ditulis dalam persamaan di bawah ini:

$$\text{Belanja Modal} = 10251.692 + 3706,214 \text{ PE} + 0,440 \text{ PAD} + 0,054 \text{ DAU} + 0,208 \text{ SiLPA}$$

Persamaan tersebut dapat diartikan:

- Jika nilai variabel PE meningkat sebesar satu satuan sedangkan nilai variabel lain tetap (*ceteris paribus*), maka akan mengakibatkan naiknya nilai variabel belanja modal sebesar 3706,214 satuan.
- Jika nilai variabel PAD meningkat sebesar satu satuan sedangkan nilai variabel lain tetap (*ceteris paribus*), maka akan mengakibatkan naiknya nilai variabel belanja modal sebesar 0,440 satuan.
- Jika nilai variabel DAU meningkat sebesar satu satuan sedangkan nilai variabel lain tetap (*ceteris paribus*), maka akan mengakibatkan naiknya nilai variabel belanja modal sebesar 0,054 satuan.

- Jika nilai variabel SiLPA meningkat sebesar satu satuan sedangkan nilai variabel lain tetap (*ceteris paribus*), maka akan mengakibatkan naiknya nilai variabel belanja modal sebesar 0,208 satuan.

Pembahasan

Setelah dilakukan pengujian serentak dengan menggunakan analisis regresi berganda maka dapat disimpulkan bahwa keempat variabel yaitu pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU dan SiLPA mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

Selain itu dilakukan juga hasil uji parsial untuk mengetahui pengaruh masing masing variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki probabilitas signifikansi pada level $0,024 < \alpha 0,05$ dan memiliki koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi tahun t mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal tahun $t+1$ dan koefisien positif yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi tahun t maka semakin besar belanja modal tahun $t+1$.

Untuk Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki probabilitas signifikansi pada level $0,000 < \alpha 0,05$ dan memiliki koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya PAD tahun t mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal tahun $t+1$ dan koefisien positif yang berarti bahwa semakin tinggi nilai PAD tahun t maka semakin besar belanja modal tahun $t+1$.

Untuk Variabel DAU memiliki probabilitas signifikansi pada level $0,048 < \alpha 0,05$ dan memiliki koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa nilai DAU tahun t mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal tahun $t+1$ dan koefisien positif yang berarti bahwa semakin tinggi nilai DAU tahun t maka semakin besar belanja modal tahun $t+1$.

Untuk Variabel SiLPA memiliki probabilitas signifikansi pada level $0,029 < \alpha 0,05$ dan memiliki koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya SiLPA tahun t mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal tahun $t+1$ dan koefisien positif yang berarti bahwa semakin tinggi SiLPA tahun t maka semakin besar belanja modal tahun $t+1$. Dari Pembahasan dan Analisis yang telah dilakukan maka dari keempat hipotesis yang di paparkan semuanya terbukti. Dengan demikian dari keempat variabel yaitu pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU dan SiLPA dapat dijadikan alat prediksi atau proyeksi dan referensi dalam penyusunan anggaran belanja modal tahun berikutnya.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pada pengujian asumsi klasik diketahui bahwa data telah terdistribusi secara normal, bebas dari multikolinearitas, heterokedastisitas dan auto kolerasi. Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, sisa lebih pembiayaan anggaran, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal. Hal ini ditunjukkan dengan dari hasil perhitungan

statistik uji F dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 berada di bawah 0,05 yang berarti secara simultan seluruh variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja modal. Pengujian secara parsial (uji t) variabel dependen yang digunakan dalam model menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi, sisa lebih pembiayaan anggaran, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal dalam APBD.

Semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan SiLPA tahun t maka semakin besar Belanja modal tahun $t+1$. Dari keempat variabel tersebut kesemuanya mempunyai pengaruh yang signifikan dengan koefisien positif. Hal ini mendukung terbuktinya hipotesa yang dipaparkan. Selain itu dari keempat variabel tersebut pada tahun t dapat digunakan untuk memprediksi atau memproyeksikan anggaran belanja modal tahun berikutnya ($t+1$).

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam studi-studi selanjutnya. Karena studi ini belum mencakup variabel variabel lain yang mungkin merupakan faktor penting, misalnya variabel utang daerah atau variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah, dan kondisi makroekonomi.

Penelitian ini juga hanya menggunakan sampel Kabupaten/Kota di Jawa dan data yang digunakan adalah data untuk 3 tahun yaitu tahun 2003, 2004 dan 2005 sehingga belum dapat dilakukan analisis yang lebih komprehensif. Untuk itu pada penelitian-penelitian sesudahnya perlu adanya penambahan data baik untuk jumlah kurun waktu maupun jumlah daerah kota/kabupaten.

Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat memberikan implikasi terhadap kebijakan publik bagi pemerintah daerah agar dapat berusaha untuk mengoptimalkan tingkat pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan SiLPA yang dapat digunakan untuk meningkatkan alokasi belanja modal dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pemerintahan. Pengalokasian besaran belanja modal dalam perencanaan anggaran dapat memanfaatkan data pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan SiLPA tahun anggaran sebelumnya untuk menjaga kesinambungan fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin (1992) *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: STIE YKPN.
- Boediono (1981) *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia (2007) "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal", *Prosiding SNA X*.

- Hariato, David dan Adi, Hari, Priyo (2007) "Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita", *Prosiding SNA X*.
- Halim, Abdul (2001) *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- (2004) *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah (2006) "Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi", *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64.
- Hartono (2008) *SPSS 16.0, Analisis Data Statistika dan Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Holtz-Eakin, Douglas, Harvey S, & Schuyley Tilly (1994) "Intertemporal Analysis of State and Local Government Spending: Theory and Tests", *Journal of Urban Economics* 35: 159-174.
- Legrenzi, Gabriella & Costas Milas (2001) *Non-Linear and Asymmetric Adjustment The Local Revenue-Expenditure Models: Some Evidence from The Italian Municipalities*. University of Milan, Working Paper
- Khusaini, Mohammad (2006) *Ekonomi Publik, Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, Malang: BPFE UNIBRAW.
- Kuncoro, Mudrajat (2004) *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- _____ (1997) *Ekonomika Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu (2000) "Fiscal Decentralization and Economic Growth in China," *Economic Development and Cultural Change Chicago*. Vol 49. Hal : 1-21.
- Lewis, Blane D. (2003) "Some Empirical Evidence on New Regional Taxes and Charges in Indonesia", *Research Triangle Institute*, North Carolina, Working Paper.
- Mahmudi (2007) *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi (2007) "Akuntansi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Dalam APBD", *Jurnal Aplikasi Bisnis*, D3 FE UII, Vol. 7 No. 11, 2007.
- Mardiasmo (2002) *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Nawatmi, Sri (2006) "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Bantuan Pemerintah Pusat di Lima Kabupaten/Kota di Jawa Tengah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 13 No 2*, September, 2006.
- Oates, Wallace E. (1995) Comment on "Conflict and Dilemmas of Decentralization" by Rudolf-Holmes. *The World Bank Research Observer*. Hal: 351-353.
- Prakosa, Kesit Bambang (2004) "Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Propinsi Jawa Tengah dan DIY)", *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Vol. 8 No. 2*, Hal: 101-118
- Saragih, Juli Panglima (2003) *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sekaran, Uma, (1992) *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*, Second Edition, John Wiley & Sons, New York
- Sidik, Machfud, Raksaka Mahi, Robert Simanjuntak dan Bambang Brodjonegoro (2002) *Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sunyoto, Danang (2007) *Analisis Regresi dan Korelasi Bivariat, Ringkasan dan Kasus*, Yogyakarta: Amara Books.
- Wong, John D. (2004) "The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity", *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, Fall. 16.3. Hal : 413-423.
- Wurzel, Eckhard (1998) *Germany Reforming Federal Fiscal Relation*, Organization for Economics Development. The OECD Observer.